

OMBUDSMAN NTT DISKUSI DENGAN PELAKU USAHA, BAHAS LAYANAN DI PELABUHAN

Kamis, 25 Agustus 2022 - Veronica Rofiana Edon

KUPANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton menerima kunjungan pelaku usaha sembako Kota Kupang, Hengky Moarloanto di ruangan kerja Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Rabu (23/8/2022).

Melalui diskusi ini, Darius mendengar cerita tentang kelancaran layanan di area pelabuhan dan layanan instansi pemerintah lain yang dirasakan Hengky sebagai pengusaha. "Mendengar langsung dari mereka yang membutuhkan layanan adalah *feedback* yang baik agar kita tahu darimana mulai memperbaikinya," tutur Darius.

Hengky memaparkan bahwa saat ini layanan pelabuhan, khususnya PT Pelindo sudah bagus, dimana waktu tunggu bongkar muat (*dwelling time*) sudah cepat karena ada dua *crane* yang beroperasi 24 jam dan ada prioritas bongkar bagi barang yang cepat rusak, seperti telur, buah, daging, dan sebagainya.

"Tidak ada masalah. Harapannya hanya satu adalah agar kapasitas pelabuhan ditingkatkan lagi agar bisa melayani bongkar muat kapal-kapal besar," jelas Hengky.

Perihal tarif kontainer/*trucking* khusus dari Pelabuhan Tenau menuju Kota Kupang yang dikeluhkan terlampau mahal turut menjadi topik diskusi. Oleh karenanya, standarisasi tarif *trucking* diperlukan karena tarif yang tidak terkontrol menjadi salah satu pemicu naiknya harga barang.

"Kami menyambut baik pernyataan GM Pelindo Kupang agar ada peraturan daerah yang mengatur tarif per-zonasi sebagaimana terjadi pelabuhan daerah lain di luar NTT. Cara ini minimal bisa menekan tarif angkut dan laju inflasi di NTT yang dominan disumbang dari sektor transportasi dan telur ayam," lanjutnya.

Kepada Hengky, Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Darius berpesan agar sebagai penguasa pemasok telur tolong dapat menekan harga telur agar tidak terlalu mahal.

"Harusnya makin banyak pemasok telur, harga di pasar tidak mencekik. Jangan sampai harga telur disepakati satu dua pengusaha sehingga menyerupai kartel. Itu sangat memberatkan masyarakat NTT yang angka kemiskinan penduduknya masih berada pada angka 20 persen atau lebih dari 1 juta orang. Kami juga mohon dukungan agar upaya-upaya perbaikan layanan terus mendapat dukungan semata-mata untuk kemajuan daerah ini," ujar Darius.

"Hindari suap, sogok, dan godaan lain kepada para aparatur negara agar mereka mampu bekerja lebih maksimal," tutupnya.

Adapun Hengky adalah pemilik UD Panca Sakti, pemasok telur yang menguasai kurang lebih 60 persen pasar di Pulau Timor. Sebagai pengguna layanan, sudah beberapa kali dilakukan diskusi dengan Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik.